

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

- Tahun Sidang : 2019-2020
- Masa Persidangan : IV
- Rapat ke- : 8
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/Tanggal : Senin, 29 Juni 2020
- Waktu : 14.12 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas Permasalahan Sengketa Lahan di Area HTI Provinsi Riau
- Ketua Rapat : Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG)
- Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 38 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir:
1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
  2. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
  3. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
  4. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas Permasalahan Sengketa Lahan di Area HTI Provinsi Riau dibuka pukul 14.12 WIB oleh Ketua Rapat, Dedi Mulyadi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai duduk persoalan dan proses penyelesaian hukum kasus sengketa lahan di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Arara Abadi di Desa Koto Pait, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian komprehensif dan langkah korektif yang nyata terhadap kebijakan masa lalu dalam menentukan kawasan hutan yang akan dibebani konsesi (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan), yang kurang mempertimbangkan eksistensi dan tatanan adat setempat (termasuk kewilayahan) hutan adat, sehingga menyebabkan terjadinya banyak tuntutan dari Masyarakat Hukum Adat akibat tidak adanya jaminan perlindungan atas hak ulayat yang mereka miliki.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan prioritas dalam melakukan mediasi terkait penyelesaian konflik tenurial dan hutan adat di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, baik HTI, HPH, maupun Restorasi Ekosistem.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menjadikan aspek kearifan lokal sebagai dasar dalam pemberian akses legal perhutanan sosial kepada masyarakat di dalam kawasan hutan.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat diberikan penguatan kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan atas semua kasus pelanggaran hukum di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data daftar Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (HTI, HPH, dan Restorasi Ekosistem) yang mengalami kasus tenurial dan hutan adat di areal kerjanya. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan mengundang perusahaan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum. Data dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.25 WIB.

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan,

ttd.

**Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Dedi Mulyadi**  
A-294